

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Penduduk

2.1.1.1 Pengertian Penduduk

Menurut Yos Rusdiansyah (2018:3) penduduk adalah :

“Setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama enam bulan atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari enam bulan.”

Menurut Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2018) menjabarkan penduduk adalah :

“Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.”

Menurut Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013), Jumlah Penduduk yaitu :

“Suatu banyak individu manusia yang dapat menepati suatu wilayah atau negara dalam kurun waktu tertentu.”

Untuk dapat menentukan jumlah penduduk didalam pada suatu wilayah dan serta dapat dilakukan dengan cara mengukur pada data demografi yang dengan secara tepat atau akurat untuk dapat menjaringnya. kemudian pada

menjaring data demografi, tersebut dilakukan dengan adanya tiga cara yang diantaranya ialah sensus penduduk, registrasi penduduk dan juga survei.

Jumlah penduduk juga merupakan suatu masalah bagi ekonomi khususnya di Jawa Barat yang apabila tidak segera ditangani maka akan menyebabkan ketidakstabilan perekonomian suatu negara. Kestabilan jumlah penduduk itu penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penduduk memiliki peran penting dalam perekonomian. Penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian karena berada pada sisi permintaan maupun sisi penawaran. Di sisi permintaan, penduduk adalah produsen jika ia pengusaha atau pedagang atau tenaga kerja jika ia hanya bekerja dalam konteks pembangunan. Pandangan terhadap penduduk terpecah menjadi dua, yaitu ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan dan ada pula yang menganggapnya sebagai pemacu pembangunan. (Amir Machmud, 2016:238-239)

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Kependudukan atau demografi adalah suatu hal yang mempelajari jumlah, persebaran, tetorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan seba-sebab perubahan

itu, yang biasanya timbul karena natalis (fertilisasi), mortalitas, gerak tetorial (migrasi) dan mobalitas sosial (perubahan status) (Ida Bagoes Mantra, 2015:2).

2.1.1.2 Cara Mengatasi Jumlah Penduduk

Berikut ini adalah beberapa cara dalam mengatasi jumlah penduduk yang secara meningkat:

1. Menggalakkan program transmigrasi nasional.
2. Memberlakukan tarif tinggi bagi para imigran.
3. Menekan pertumbuhan penduduk dengan membuat program Keluarga Berencana (KB).
4. Membuat Undang-Undang yang menetapkan usia minimal menikah.
5. Menyebarkan pendidikan tentang kependudukan ke semua jenjang pendidikan.
6. Mempermudah serta meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan.
7. Menyadarkan dan meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat.
8. Pemerataan dan perluasan lapangan pekerjaan.
9. Membatasi tunjangan anak bagi PNS dan ABRI hingga anak kedua.

2.1.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di pengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. Kelahiran adalah proses pertumbuhan penduduk yang dilihat dari jumlah anak, yaitu jumlah kelahiran tiap 1.000 orang penduduk per tahun.
2. Kematian adalah jumlah berkurangnya penduduk yang dilihat dari pertahun perseribu penduduk. Kematian merupakan penentu naik turunnya penduduk.

3. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bertujuan menetap di suatu tempat atau wilayah ke tempat lain. Perpindahan penduduk membuat penduduk yang datang membuat jumlah penduduk bertambah.

2.1.1.4 Dampak dari Masalah Penduduk

Pada umumnya perkembangan penduduk di negara sedang berkembang sangat tinggi dan besar jumlahnya. Masalah pertumbuhan penduduk bukanlah sekedar masalah jumlah, masalah penduduk juga menyangkut kepentingan pembangunan serta kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap penduduk terpecah dua, ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan, ada pula yang menganggap sebagai pemicu pembangunan. Alasan penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan, dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Jumlah penduduk yang meningkat membawa dampak sebagai berikut:

1. Jumlah angkatan kerja bertambah secara cepat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk.
2. Kemampuan menciptakan tambahan kesempatan kerja di suatu wilayah akan rendah.
3. Angka pengangguran semakin meningkat menghasilkan pendapatan yang rendah, serta kesejahteraan rendah.

2.1.2 Pendidikan

2.1.2.1 Pengertian Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang telah ditetapkan berdasarkan pada tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan, bahan pengajaran, dan cara menyajikan bahan pengajaran. Sedangkan Pengertian pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata pendidikan sebagai suatu proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui cara pengajaran dan pelatihan.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang disebut dengan pendidikan adalah :

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan :

“Segala daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan lingkungan dan masyarakat.”

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, karena tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat untuk mengurangi

tingkat kemiskinan. Pendidikan menitikberatkan pada pengembangan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan manusia serta pekerja dalam proses pembangunan. Dikarenakan kontribusinya yang besar terhadap pembangunan ekonomi, pendidikan disebut *human capital*.

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk suatu bangsa, pendidikan yang rendah membuat minimnya sumber daya manusia atau terjadinya banyak kebodohan yang akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan. Maka dari itu, sangat penting untuk kita memahami bahwa kemiskinan dapat mengakibatkan kebodohan, lalu sebaliknya juga bahwa kebodohan juga dapat mengakibatkan kemiskinan. Pendidikan bisa dijadikan solusi untuk memutus rantai sebab akibat antara kebodohan dan kemiskinan, karena pendidikan dapat dijadikan cara atau solusi untuk menghapus kebodohan juga tentunya kemiskinan.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pendidikan

Dalam hal ini proses pendidikan merangkai bentuk-bentuk belajar secara informal, formal, maupun non formal baik secara langsung dari keluarga, sekolah, pekerjaan, atau kehidupan masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis pendidikan menurut para ahli dibagi menjadi dua bagian yaitu yang berdasarkan pada berlangsungnya pendidikan yang didasarkan pada bentuknya :

1. Pendidikan menurut tempat berlangsungnya pendidikan. Ki Hajar Dewantoro membagi pendidikan menjadi tiga bagian yang disebut dengan Tri Pusat

Pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat.

2. Pendidikan menurut sifatnya

a. Pendidikan Informal

Pendidikan ini diselenggarakan untuk meletakkan dasardasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta yang diperlukan anak untuk hidup dilingkungan masyarakat dan juga memeberikan bekal kemampuan dasar dan mengembangkan potensi diri yang sesuai dengan pendidikan sedini mungkin dan seumur hidup.

b. Pendidikan Formal

Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan jenjang pendidikan dari tingkat bawah, menengah, sampai atas yang berlangsung di dalam sekolah dengan meteri pembelajaran yang bersifat akademis yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Jenjang pendidikan formal antara lain :

1) Pendidikan Dasar

Digunakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan dan meberikan pengetahuan, ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dan mempersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

2) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Pendidikan menengah digunakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar dan mempersiapkan menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik atau interaksi sosial terhadap lingkungan sosial, budaya sekitar, dan mengembangkan potensi diri lebih dalam guna untuk dunia kerja atau pendidikan tinggi.

3) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Dan perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, ataupun universitas.

c. Pendidikan Nonformal

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, menjelaskan bahwa pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan ini berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan fungsional dan pengembangan sikap dan kepribadian

profesional. Pendidikan nonformal terdiri dari lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, serta pendidikan yang sejenis.

Pada masa sekarang, dalam dunia pendidikan telah adanya inovasi dimana inovasi ini sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, yang mana didukung dengan adanya teknologi sehingga memudahkan peserta didik dalam menimba ilmu. Inovasi yang dilakukan baik proses pembelajarn dengan menggunakan media baik handphone, laptop ataupun komputer.

2.1.2.3 Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan yaitu dapat meningkatkan kualitas didalam diri manusia, dimana manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian (mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan lain-lain). Dan juga pendidikan nasional juga harus dapat menumbuhkan rasa patriotik dan rasa cinta terhadap negara sendiri atau meningkatkan semangat kebangsaan serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap dalam menghargai jasa-jasa para pahlawan. Pendidikan juga memberikan motivasi, pembenaran, dan juga dukungan sosial untuk pencarian dan pengaplikasiannya.

2.1.2.4 Indikator-Indikator dalam Pendidikan

Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator seperti :

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS), merupakan proporsi semua anak pada satu kelompok umur tertentu yang masih sekolah terhadap penduduk pada kelompok umur yang sesuai. Semakin tinggi APS pada kelompok usia tertentu menunjukkan terbukanya peluang besar bagi penduduk disuatu wilayah.
2. Angka partisipasi Murni (APM), merupakan ukuran pada anak sekolah pada kelompok usia tertentu yang bersekolah sesuai dengan kelompok usianya dan APM ini digunakan untuk mengukur apakah anak yang bersekolah sesuai dengan usianya atau waktunya.
3. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, indikator yang digunakan untuk melihat kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yaitu dengan cara melihat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Pendidikan yang telah ditamatkan oleh seseorang dapat ditandai dengan adanya sertifikat/ijazah. Dan dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat.
4. Angka Melek Huruf (AMH), merupakan penduduk dalam usia tertentu yang memiliki kemampuan baca tulis huruf latin ataupun huruf yang lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulisnya, dalam penduduk kelompok usia tertentu.
5. Angka Buta Huruf (ABH), merupakan penduduk dalam usia tertentu yang tidak dapat membaca ataupun menulis huruf latin atau huruf yang lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulisnya, dalam kelompok usia tertentu. Angka buta huruf yang tinggi menandakan belum meratanya pendidikan yang diperoleh penduduk disuatu wilayah.

6. Rata-Rata Lama Sekolah, merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan setiap masyarakat pada semua jenjang pendidikan formal yang telah dijalani. Rata-rata lama sekolah merupakan gabungan antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang telah ditamatkan. Sehingga semakin tinggi ratarata lama sekolah maka menunjukkan semakin banyak jumlah tahun standar yang harus dihabiskan seseorang untk menamatkan jenjang pendidikan.

Konsep Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) bisa dijadikan salah satu cara untuk mengukur pendidikan. Pengertian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years School* (MYS) adalah jumlah tahun yang ditempuh masyarakat dalam menjalani pendidikan formal. Dalam rangka meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, pemerintah sudah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun atau dari jenjang pendidikan dasar hingga SMA.

$$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}}$$

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dimana:

- P15+ : Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas
- Lama sekolah penduduk ke-i:
 - Tidak pernah sekolah = 0
 - Masih di sekolah SD sampai dengan S1 = Konversi ijazah terakhir +kelas terakhir –1
 - Masih di sekolah S2 atau S3 = Konversi ijazah terakhir +1
 - Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir

- Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1
- Tidak punya ijazah = 0
- SD = 6 tahun; SMP = 9 Tahun; SMA = 12 tahun
- D1/D2 = 14 tahun; D3 = 15 tahun; D4 = 16 tahun; S1 = 17 tahun
- S2 = 19 tahun; S3 = 22 tahun

2.1.3 Pengangguran

2.1.3.1 Pengertian Pengangguran

Menurut Iskandar Putong (2013:426-427), Pengangguran atau orang yang menganggur adalah :

“Mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masa kerjanya. Usia kerja biasanya adalah usia yang tidak dalam masa sekolah tapi di atas usia anak-anak (relatif di atas 6-18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD tamat SMA).”

Menurut Sukirno (2011:13), pengangguran adalah :

“Di mana keadaan seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran merupakan angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang yang sedang menyiapkan suatu usaha, pengangguran juga biasa dikatakan penduduk yang sedang mencari

pekerjaan karena merasa tidak mendapatkan pekerjaan atau sudah bekerja tetapi belum memulai bekerja.”

Menurut BPS (2017) pengangguran adalah :

“Penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Konsep pengangguran seperti ini dikenal sebagai pengangguran terbuka.”

Pengangguran merupakan suatu masalah yang sering melanda kegiatan perekonomian suatu negara dan sangat penting untuk ditanggulangi. Hal ini akan menimbulkan dampak-dampak negatif apabila tingkat pengangguran tinggi. Dampak dari pengangguran tersebut dapat berupa dampak ekonomi dan dampak sosial (Sukirno, 2011:13).

2.1.3.2 Tingkat Pengangguran

Menurut Sukirno (2011:79), tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Jumlah penduduk dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi penduduk usia kerja (15-64 tahun) dan bukan usia kerja yang termasuk kedalam kelompok bukan usia kerja (usia non produktif) yaitu usia 0-4 tahun dan manusia lanjut usia (manula) yang berusia lebih dari 65 tahun. Dari jumlah penduduk usia kerja yang masuk kedalam angkatan kerja adalah mereka yang mencari kerja atau bekerja.

2.1.3.3 Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Rosa,dkk (2019:283-293) jenis pengangguran dibagi menjadi empat kategori yaitu:

1. Pengangguran friksional yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya. Jenis pengangguran ini dapat pula terjadi karena berpindahnya orang-orang dari suatu daerah ke daerah lain atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan akibatnya harus mempunyai tenggang waktu dan berstatus sebagai penganggursebelum mendapatkan pekerjaan yang lain.
2. Pengangguran struktural yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian. Pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia.
3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan ekonomi mengalami kemuduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan memproduksinya.

Berbagai penyebab diatas menunjukkan pengangguran ini dapat terjadi karena tidak bertemunya pasar kerja yang bertemu dengan angkatan kerja, sehingga terjadilah pengangguran. Salah satu cara untuk mengatasi pengangguran tersebut adalah dengan membuat angkatan kerja bertemu dengan pasar kerja.

2.1.3.4 Bentuk Pengangguran

Menurut Sukirno (2011:330), jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya sebagai berikut:

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka terjadi sebagai akibat pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga banyak tenaga kerja tidak memperoleh pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai pekerjaan.

2. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi merupakan keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang melebihi dari yang diperlukan. Antara lain faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai sehingga perusahaan mendorong menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru akan mengurangi pengangguran, akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat akan menurun dengan banyak. Misalnya, di negara produsen bahan mentah.

3. Pengangguran Musiman

Pengangguran yang terjadi dimasa-masa tertentu dalam suatu tahun. Fenomena ini bisa terjadi pada sektor pertanian dimana petani akan

menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.

4. Setengah Menganggur

Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena ketiadaan lapangan kerja atau pekerjaan, atau pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia jam kerja normal adalah 35 jam seminggu.

5. Pengangguran Teknologi

Pengangguran ini disebabkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin dan bahan kimia seperti misalnya racun rumput, mesin, dan robot sehingga mengurangi pengguna tenaga kerja manusia. Inilah yang dinamakan pengangguran teknologi.

2.1.3.5 Dampak Pengangguran

Menurut Sukirno (2011:14), beberapa akibat buruk dari pengangguran yang dibedakan ke dalam dua aspek yaitu:

1. Akibat buruk ke atas kegiatan perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari memperlihatkan berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran.

2. Akibat buruk ke atas individu dan masyarakat

Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah:

- a. Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencarian dan pendapatan.
- b. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan-keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.
- c. Pengangguran dapat menimbulkan ketidak stabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa puas kepada pemerintah.

2.1.4 Kemiskinan

2.1.4.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan muncul karena adanya ketidakmampuan sebagian hidup masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kemiskinan merupakan fenomena yang dinamis, rumah tangga yang tidak miskin dapat masuk ke dalam kemiskinan karena adanya krisis ekonomi, penyakit, dan lain-lain. Begitupun sebaliknya, rumah tangga yang miskin dapat keluar dari kemiskinan karena adanya kenaikan pendapatan, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan lain-lain.

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang bermakna tidak berharta benda dan serba kekurangan.

Menurut Amir Machmud (2016:282) kemiskinan adalah :

“Keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan ,dan kesehatan.”

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses ke pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, dimana sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan *evaluative*, serta sebagian laainnya memahaminya dari sudut pandang ilmiah yang telah mapan.

Menurut Supriatna (1997:90) dalam Islami & Anis (2019) kemiskinan adalah :

“Keadaan yang tidak dapat tercukupi oleh seseorang yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan.”

Sedangkan menurut BPS (2017), kemiskinan adalah :

“Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana adanya ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kehidupan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini terjadi karena rendahnya pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Kemiskinan merupakan *cross sectors problem*, *cross areas*, dan *cross generation*, sehingga untuk menanganinya dibutuhkan pendekatan yang terpadu,

komprehensif, dan berkelanjutan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemahaman mengenai “kemiskinan” sudah seharusnya beranjak dari pendekatan berbasis hak (*right based approach*). Pendekatan ini berarti bahwa negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap.

2.1.4.2 Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk pemasalahan multidimensional, menurut Chambers dalam Tjiabrata *et al* (2021) kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk yaitu:

1. Kemiskinan *Absolut*

Kemiskinan *absolut* merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi karena pendapatan seseorang tersebut berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan standar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang dibutuhkan agar kualitas hidupnya meningkat.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya kebijakan pembangunan yang tidak merata sehingga mengakibatkan ketimpangan pendapatan atau ketimpangan kesejahteraan di suatu daerah tersebut. Daerah tersebut biasanya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya perilaku dan kebiasaan masyarakat yang berasal dari budaya atau adat istiadatnya yang enggan untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan tata cara modern. Kebiasaan tersebut berupa sikap malas, tidak hemat, tidak memiliki inovasi, dan hidupnya relatif bergantung pada orang lain.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi karena masyarakat tidak dapat menggunakan sumber daya yang berada di wilayahnya karena telah dikuasai oleh orang lain.

2.1.4.3 Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro (2010:8) dalam Sari (2021) secara mikro, penyebab kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola dalam kepemilikan sumber daya yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan juga muncul karena adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan produktivitasnya rendah sehingga mengakibatkan pendapatannya pun rendah. Rendahnya kualitas SDM ini disebabkan karena penduduk miskin rata-rata tingkat pendidikannya rendah.

Adapun penyebab dasar kemiskinan menurut Bank Dunia dalam Tjiabrata *et al* (2021) yaitu sebagai berikut:

1. Kegagalan kepemilikan tanah dan modal.
2. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok, sarana, dan prasarana.
3. Terdapat perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan antar sektor ekonomi.

4. Rendahnya produktivitas masyarakat.
5. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*).
6. Mengelola sumber daya alam dalam jumlah yang banyak dan tidak berwawasan lingkungan.

Sedangkan menurut Pateda *et al* (2017) terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan yaitu:

1. Pengangguran

Pengangguran diartikan sebagai seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan berarti tidak memiliki pendapatan. Tidak memiliki pendapatan akan menyebabkan seseorang berada dalam kemiskinan.

2. Tingkat pendidikan yang rendah

Masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat yang berpendidikan rendah akan kalah saing dalam mendapatkan pekerjaan sehingga akan menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan naik.

3. Bencana alam

Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami dapat menjadi penyebab kemiskinan, karena masyarakat yang terdampak bencana tersebut akan kehilangan harta bendanya.

4. Malas bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) pada seseorang akan mengakibatkan tidak adanya gairah untuk bekerja sehingga seseorang tersebut tidak akan memiliki pendapatan dan menjadi miskin.

5. Keterbatasan modal

Keterbatasan modal akan menyebabkan kemiskinan. Seseorang yang tidak mempunyai modal tidak akan bisa melakukan usaha sehingga tidak mendapatkan penghasilan.

2.1.4.4 Teori Kemiskinan

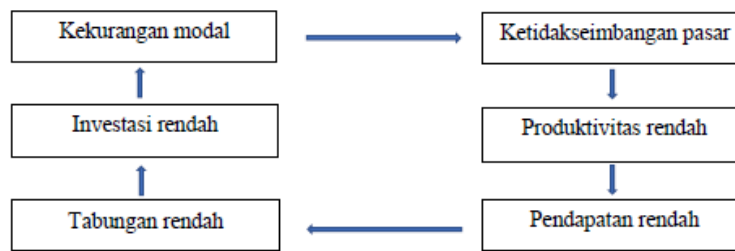
Begitu banyaknya pendapat mengenai teori kemiskinan sehingga faktor yang mempengaruhi kemiskinanpun juga berbagai macam. Untuk itu penulis merangkum beberapa teori tentang kemiskinan yang dijadikan dasar teori penelitian. Salah satunya yaitu konsep kemiskinan menurut *World Bank* bahwa kemiskinan sebagai kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well being*). Dikatakan demikian jika orang yang tidak sejahtera dapat digolongkan sebagai orang miskin (terjadi kemiskinan). Hal tersebut didukung dengan pengertian kemiskinan menurut BPS yang mengemukakan bahwa kemiskinan dapat dilihat dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang kemudian dikonsepskan seperti pada Gambar 2 bahwa GKM dapat dilihat dari terpenuhinya minuman dan makanan sedangkan GKNM dapat diukur dari terpenuhinya pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu dikatakan terjadi kemiskinan jika tidak sejahtera yang mana kesejahteraan dapat diukur dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.



Gambar 2.1
Konsep Kemiskinan Menurut BPS

Teori kedua yang digunakan oleh Ragnar Nurske (1952) dalam Salsabilla *et al* (2022) yaitu lingkaran kemiskinan dalam bukunya yang berjudul “*Some Aspects of Capital Accumulation in Underdeveloped Countries*”. Lingkaran kemiskinan ini merupakan suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga akan mengakibatkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami kesulitan dalam mencapai pembangunan yang baik. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal dapat menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan pendapatan rendah. Rendahnya pendapatan menyebabkan rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi menyebabkan keterbelakangan dan seterusnya.

Menurut Ragnar Nurske dalam Didu & Fauzi (2016) terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang dapat menghalangi pembangunan yang baik di negara berkembang yaitu dari segi *demand* dan *supply*. Berikut adalah gambar lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*):



Gambar 2.2
Lingkaran Setan Kemiskinan

Dari segi *supply*, lingkaran setan kemiskinan dapat dikatakan sebagai berikut. Rendahnya produktivitas akan menyebabkan pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah akan mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan menabung rendah, menyebabkan tingkat investasi rendah, tingkat investasi yang rendah akan menyebabkan kekurangan modal. Dengan demikian, tingkat produktivitasnya pun rendah sehingga akan memunculkan kemiskinan.

Dari segi *demand*, lingkaran setan kemiskinan dapat dikatakan sebagai berikut : Luas pasar yang terbatas menyebabkan penanaman modal di negara miskin cenderung rendah, hal tersebut disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang rendah. Pendapatan masyarakat yang rendah disebabkan oleh rendahnya produktivitas yang ditunjukkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan oleh kurangnya pendorong untuk melakukan penanaman modal, sehingga kemiskinan yang terjadi tidak akan ada ujungnya.

2.1.4.5 Indikator Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik, indikator kemiskinan terdiri dari (Badan Pusat Statistik, 2016) :

1. *Head Count Index*, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
2. *Poverty Gap Index* (Indeks kedalaman kemiskinan), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
3. *Poverty Severity Indeks* (Indeks keparahan kemiskinan), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu mengenai pengaruh kepemimpinan dan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fauzaini Nanda Cahyani dan Sri Muljaningsih (2022) Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Gresik	Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan	Kemiskinan	- Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan menunjukkan pengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Gresik.	Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8, No. 1 (2022) 1-10 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

No.	Penelitian Terdahulu		Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2.	Isabella Catarina Ketaren (2018)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara	Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran	Kemiskinan	Pengeluaran Pemerintah dan pengangguran secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	Jurnal Ilmiah Skylandsea. Vol.2 No. 2 116-121 ISSN: 2614- 5144
3.	Ita Arista, I Wiranthi dan Ida Darsana (2017)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali	Pendidikan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi	Kemiskinan	Pendidikan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh simultan dan signifikan terhadap kemiskinan, Secara parsial tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.	E-Jurnal IESP Univ. Udayana. Vol.6 No.5 677-704 ISSN: 2303-0178
4.	Ema Dian Wiwin Primandhana, Mohammad (2021)	Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur.	Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia	Tingkat Kemiskinan	Jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.	Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 12(2), November 2021, 129-136 Fakultas Ekonomi, Universitas Batanghari Jambi ISSN 2580-6882 (Online), ISSN 2087-5304

No.	Penelitian Terdahulu	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Diah Retnowati dan Harsuti (2013) Pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah.	Pengangguran	Kemiskinan	Pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.	Jurnal Univ. Wijayakusuma purwokerto. Vol. 2. No. 6. 608-618.
6.	Uray Dian Novita dan Nur Istiqamah (2017) Pengaruh Produk Domesitik Regional Bruto Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sambas.	Produk Domesitik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan dan Pengangguran	Kemiskinan	Produk Domesitik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.	Jurnal Manajemen Motivasi. Vol. 13. No. 1. 815- 820. ISSN : 2407-5310
7.	Waseso Segoro dan Muhamad Akbar Pou (2016) Analisis Pengaruh Produk Domesitik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2012	Produk Domesitik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran	Tingkat Kemiskinan	Secara simultan PDRB, inflasi, IPM, dan pengangguran berpengaruh signifikan namun secara parsial, PDRB dan inflasi tidak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.	Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol.6 No. 1. 28-34. ISSN : 2089- 3590

No.	Penelitian Terdahulu	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Durrotul Mahsunah (2013) Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur.	Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran	Kemiskinan	Jumlah penduduk dan pendidikan, dan pengangguran secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan. Sedangkan pengangguran berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan.	Jurnal Univ. Negeri Surabaya Vol. 2 No. 3. 1-17
9.	Sari, Dedy Anwar dan Darussamin Sindi Paramita (2016) Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2013.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran	Kemiskinan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.	I-Economic Vol. 2. No. 1

No.	Penelitian Terdahulu	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Septyana Mega Putri dan Ni Nyoman Yuliarmi (2013) Beberapa faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Bali	Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran	Kemiskinan	Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemiskinan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	E-Jurnal EP Unud. Vol. 2. No. 10. 441-448. ISSN : 2303- 0178

2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini, maka dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan pengaruh pendidikan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan.

1. Hubungan Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kemiskinan

Masalah jumlah penduduk tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap tingkat kemiskinan, dimana semakin banyak jumlah penduduk dalam

suatu negara terutama bagi negara berkembang, maka angka kemiskinan akan bertambah terutama di Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah belum tentu menjamin apakah individu telah sejahtera atau tidak. Untuk itu jika jumlah penduduk dalam suatu wilayah tinggi meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi tidak menjadi jaminan masyarakat sejahtera dan keluar dari garis kemiskinan.

Menurut Todaro & Smith (2006:311) menyatakan bahwa masalah pertumbuhan jumlah penduduk bukan hanya sekedar jumlahnya saja. Masalah jumlah penduduk yang tidak terkendali memiliki hubungan dengan kepentingan pembangunan serta menyangkut urusan kesejahteraan umat manusia. Semakin meningkatnya jumlah penduduk itu dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius, khususnya mengenai kesejahteraan penduduk. Hingga pada akhirnya terperangkap dalam kemiskinan (Nabi et al., 2020).

Relevan dengan penelitian Wahyu Azizah et al., (2018) bahwa faktor penyebab kemiskinan dikarenakan adanya jumlah penduduk yang meningkat yang tanpa dibarengi dengan pertumbuhan lainnya. Namun pada penelitian Agustina et al., (2018), Hajar (2020) dan Hilmi et al., (2022) menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena penduduk tumbuh dengan diimbangi dengan kualitas SDM yang semakin membaik. Jumlah penduduk bukan satu-satunya penyebab terjadinya kemiskinan.

2. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Kemiskinan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan utama manusia, karena pendidikan merupakan kunci agar manusia dapat berdaya dan berkarya sesuai

dengan potensi dan kemampuannya. Pendidikan memiliki nilai yang sangat strategis dan penting dalam pembentukan suatu negara. Pendidikan juga berupaya untuk menjamin kehidupan suatu bangsa sebab melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia akan meningkat sehingga negara dapat melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Di Provinsi Jawa Barat sendiri pandangan penduduk akan pentingnya pendidikan masih cukup rendah terutama bagi masyarakat yang tinggal dipedesaan, hal ini disebabkan oleh pandangan terhadap pendidikan itu sendiri. Pandangan seseorang dipengaruhi oleh pengalaman dan kebudayaannya. sebagai contoh sederhananya berapa banyak pengaruh pendidikan terhadap tingkat keberhasilan orang untuk menjadi kaya. Kesan masyarakat terhadap kesuksesan dan kekayaan tidak berkorelasi dengan pendidikan terutama bagi masyarakat pedesaan, mereka menganggap bahwa untuk mencapai keberhasilan hanya dengan kerja keras dalam melakukan usahanya, selain itu orang tua dipedesaan lebih memilih menikahkan anak gadis nya ketika menginjak dewasa karena mereka beranggapan bahwa meskipun sekolah sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dia akan tetap pergi kerumah tangga. Hal ini merupakan salah satu penyebab angka melek huruf di Indonesia. Melek huruf dimaknai sebagai kemampuan untuk menjalin hubungan dengan oranglain melalui pembicaraan, membaca dan menulis yang diaplikasikan pada kemampuan untuk memanfaatkan media massa dan berbagai teknologi informasi. Tujuan melek huruf adalah peningkatan taraf kehidupan masyarakat, penyelesaian masalah kemanusiaan dan perluasan kapasitas individu dan sosial dimasyarakat.

Melek huruf merupakan salah satu indikator pendidikan. Kesejahteraan

masyarakat akan berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas sehingga angka melek huruf akan semakin meningkat. Sebaliknya negara-negara yang tingkat kemiskinannya masih tinggi akan selaras dengan sumber daya manusia yang tingkat pendidikannya rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Rudy Susanto dan Indah Pangesti (2019) yang menyebutkan bahwa Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di daerah DKI Jakarta. Seseorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi cenderung lebih memungkinkan dalam memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang pendidikannya rendah. Hal ini peningkatan pendapatan individu akan meningkatkan kemampuan konsumsi, sehingga mengentaskan mereka dari kemiskinan.

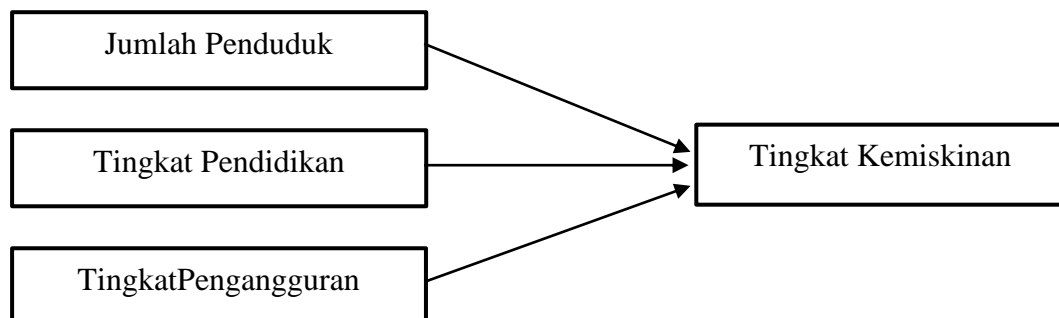
3. Hubungan Tingkat Pengangguran dengan Tingkat Kemiskinan

Menurut Muhadir (2015) Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah. Bagi sebagian besar masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap dipemerintah dan swasta biasanya termasuk pada kelompok kelas menengah ke atas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah individu yang mungkin bekerja secara penuh per hari tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang

mandiri disektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka masih sering tetap miskin. Penelitian terdahulu oleh Bintang & Woyati (2018), Kurniawan (2018) dan Meo et al (2020) dengan hasil bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran memiliki dampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan.

Menurut teoritis bila individu memiliki pekerjaan berarti ia bekerja dan menerima pendapatan, dimana dari pendapatan yang diterima diharapkan mereka mampu untuk mencukupi setiap kebutuhan pokoknya. Apabila kebutuhan pokok tercukupi maka mereka bukan termasuk kriteria miskin. Maka dari teori tersebut dapat kita tarik simpulan bahwa jika angka pengangguran bernilai sedikit, angka kemiskinan pun akan sedikit dan juga sebaliknya (Susanto et al., 2018).

Maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara berupa dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Hipotesis merupakan

dugaan sementara yang masih diuji. Oleh karena itu hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran (Suryani dan Hendrayadi, 2015:98).

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga secara parsial Jumlah Penduduk berpengaruh negatif sedangkan Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022.
2. Diduga Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022.